

## Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih

Arlayati Arlayati<sup>1</sup>, Ikhwan Ikhwan<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [ikhwan@fis.unp.ac.id](mailto:ikhwan@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui akses lebih baik ke pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitas PKH di Kelurahan Sungai Sapih masih belum efektif dikarenakan masyarakat masih memanfaatkan bantuan PKH untuk kebutuhan yang lain seperti membayar hutang, membeli perlengkapan dapur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu teori struktural fungsional dari Robert K. Merton yang menjelaskan bahwa setiap konsekuensi-konsekuensi atau dampak yang disadari akan menciptakan penyesuaian dalam suatu sistem. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan 13 informan dengan kriteria yaitu Lurah Sungai Sapih, Pendamping PKH, dan penerima PKH. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dilakukan kepada informan yang terlibat sebagai Penerima PKH, serta studi dokumentasi dikumpulkan melalui dokumen yang ada di Kantor Sungai Sapih. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, sumber dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sapih dapat dievaluasi berdasarkan lima indikator menurut Sutrisno: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. PKH telah membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Hambatan utama terlihat pada indikator tercapainya tujuan, sebagian penerima masih menggunakan bantuan untuk keperluan di luar ketentuan, seperti membayar utang, membeli perlengkapan dapur, modal usaha, dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan PKH sebagaimana tertuang dalam Permensos No. 1 tahun 2018.

**Kata Kunci:** Bantuan Sosial; Evaluasi Efektivitas; Kemiskinan; PKH; Pendidikan.

### Abstract

PKH is a conditional social assistance that aims to improve the welfare of the poor through better access to education and health. However, the effectiveness of PKH in Sungai Sapih is still ineffective because people still use PKH assistance for other needs such as paying debts, buying kitchen equipment. This study aims to explain the effectiveness of the PKH for the community in Sungai Sapih Village. The theory used to analyze this study is the structural functional theory of Robert K. Merton which explains that every consequence or impact that is realized will create adjustments in a system. The informant selection technique uses purposive sampling technique with 13 informants with the criteria, namely the Head of Sungai Sapih Village, PKH Companions, and PKH recipients. This research approach uses qualitative with a case study type. Data collection techniques through in-depth interviews, conducted with informants involved as PKH recipients. As well as documentation studies collected through documents available at the Sungai Sapih Office. Data validity checks use triangulation techniques, sources and time. The results of the study indicate that the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Sungai Sapih Village can be evaluated based on five indicators according to Sutrisno: program understanding, target accuracy, timeliness, achievement of goals, and real change. PKH has helped ease the burden of community expenditure, but has not been fully effective in overcoming poverty and increasing income. The main obstacle is seen in the indicator of achieving goals, some recipients still use assistance for purposes outside the provisions, such as paying debts, buying kitchen equipment, business capital, and daily needs. This is not in accordance with the objectives of PKH as stated in Permensos No. 1 of 2018.

**Keywords:** Education; Evaluation of Effectiveness; PKH; Poverty; Social Assistance.

---

**How to Cite:** Arlayati, A. & Ikhwan, I. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 8(2), 187-199.

---



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

---

## Pendahuluan

Kemiskinan hampir selalu menjadi masalah umum di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia saat ini, kemiskinan menjadi tantangan serius di Indonesia karena banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Menurut Suryosubroto, pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan kesadaran terhadap tujuan, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Parida, 2022). Kemiskinan dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek psikologi seperti rendahnya rasa percaya diri. Selain itu, kemiskinan juga berpotensi diwariskan dari suatu generasi. Kualitas hidup yang rendah pada masyarakat miskin berdampak pada terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya berpengaruh tingkat produktivitasnya mereka (Utomo et al., 2019).

Maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk bisa mengurangi keluarga miskin di Indonesia, berbagai bantuan sosial telah diberikan oleh pemerintah diantaranya dana BOS, jamkesmas, PNPM-Mandiri, Raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) (Usman, 2019). Kebijakan penanggulangan kemiskinan tertuang dalam tiga arah kebijakan pemerintah. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kedua, kebijakan langsung khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan. Diantara program ini didesain bukan hanya untuk memastikan standar hidup keluarga rumah tangga miskin tetap menjaga ketika berhadapan dengan economic shock, tetapi juga diharapkan memberikan ruang bagi peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga (Rizayani et al., 2022).

Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang sosial. Program ini berusaha untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warna miskin di Indonesia (Syahriani, 2016). Program PKH telah berjalan di Indonesia sejak tahun 2007 hingga saat ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta memastikan bahwa keluarga yang tergolong dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dapat memperoleh pendidikan yang layak, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan bantuan yang diberikan melalui PKH (Mulyasri & Hasmira, 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) berhak mendapatkan : a) Bantuan Sosial PKH, b) Pendamping PKH, c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan d) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi perumahan, dan menyediakan kebutuhan dasar lainnya. Keluarga penerima PKH harus memenuhi kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Komponen pendidikan meliputi: a) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, b) Sekolah menengah pertama/madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Komponen kesejahteraan meliputi : a) usia lanjut mulai dari 60 (enam puluh) tahun, b) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Bantuan diberikan dalam bentuk uang melalui rekening berupa bantuan tetap dan bantuan sesuai komponen dalam keluarga. Pemberian bantuan komponen tersebut maksimal untuk 4 (empat) orang dalam satu keluarga (Sofianto, 2020).

Menurut data Dinas Sosial kota Padang pada tahun 2021 ada sekitar 17.547 KPM yang terbesar di 11 Kecamatan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Padang pada tahun 2021, Salah Kecamatan yang memiliki jumlah penerima PKH terbanyak ada di Kecamatan Kuranji dengan jumlah PKH 2.863 penerima. Hal tersebut membuktikan, bahwa Kecamatan Kuranji masih terdapat masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan. Mata pencaharian masyarakat miskin di Kecamatan Kuranji rata-rata bertani, sehingga pendapatan yang mereka terima masih rendah (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kemiskinan di Kecamatan Kuranji tiap tahunnya tidak banyak kurang, hal tersebut dibuktikan dari data Koordinator PKH tingkat Kecamatan Kuranji pada tahun 2021 jumlah penerima PKH ada 2.863. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Pemerintah untuk membantu masyarakat Kecamatan Kuranji dalam

---

mensejahterakan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan melalui Program PKH. Kecamatan Kuranji telah melaksanakan PKH dari tahun 2014 hingga saat ini (Badan Pusat Statistik, 2022).

Berdasarkan data koordinator Kecamatan Kuranji, Pada tahun 2022 Kelurahan Sungai Sapih memiliki jumlah penerima PKH terbanyak dibandingkan Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Kuranji memiliki 606 jumlah penerima PKH. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data wawancara dengan Koordinator PKH Kecamatan Kuranji mengenai penggunaan bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dari kondisi pendidikan anak-anak penerima PKH di Kelurahan Sungai Sapih, diketahui bahwa meskipun mereka masih bersekolah, motivasi belajar tergolong standar. Hal ini dibuktikan dengan hasil capaian presentasi belajar yang tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya ketersediaan buku LKS untuk semua mata pelajaran, keterlambatan beberapa anak dalam memperoleh LKH, serta keterbatasan pembayaran uang Komite. Di sisi lain, kondisi kesehatan anak usia dini di daerah tersebut umumnya dikatakan baik (Badan Pusat Statistik, 2022).

Efektivitas PKH dapat dilihat dari suatu kegiatan yang dilaksanakan antara tujuan dan realisasi program dapat diukur dengan menggunakan 5 indikator yaitu (1) Pemahaman program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang program keluarga harapan (PKH). (2) Ketepatan sasaran, merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pelaksanaan program, karena memberikan tolak ukur mengenai program yang sudah dilaksanakan. (3) Ketepatan waktu, dalam pencairan bantuan PKH sangat dibutuhkan, mengingat bantuan sosial yang diberikan setiap tiga bulan sekali, kepada masing-masing penerima PKH. (4) Tercapainya Tujuan, Tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran target yang dilaksanakan melalui beberapa tahap yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. (5) Perubahan nyata, merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau kelompok terkait pelaksanaan kegiatan atau program yang telah dilaksanakan (Muin & Rosdiana, 2020).

Salah satu daerah yang menjalankan atau yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Daerah ini merupakan salah satu daerah di Kota Padang yang beberapa diantaranya masyarakat penerima bantuan PKH. Dalam penerimaan bantuan PKH jumlah uang yang diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut, sesuai yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial. Berdasarkan data wawancara penulis dengan informan, mengungkapkan bahwa bantuan PKH bukan hanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan saja, akan tetapi digunakan untuk yang lain seperti membeli peralatan dapur, kartu PKH untuk jaminan membayar hutang, modal usaha, dan membeli baju. (Ibu Martitah, 48 tahun wawancara tanggal 21 Agustus 2024).

Dalam pernyataan di atas kurangnya efektif dalam menggunakan dana PKH tersebut berlaku dalam penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), diberikan sebuah pedoman terhadap masyarakat yang menerima bantuan itu sendiri yang mengikuti syarat dan kewajiban Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pasal 6 tentang Program Keluarga Harapan, yang berbunyi: "Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak mendapatkan: a) Bantuan Sosial PKH, b) pendampingan PKH, c) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial, dan d) program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan penyediaan kebutuhan dasar lainnya (Sofianto, 2020).

Peneliti terkait PKH sudah pernah dilakukan, seperti pertama dilakukan Sasmito & Nawangsari, (2019) menjelaskan tentang bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terjalin secara baik dengan Pendamping PKH, dan Peserta PKH. Dinas Sosial melibatkan Pendamping PKH dalam rapat koordinasi, seminar dan matriks sebagai bekal untuk meningkatkan profesional dalam implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya penelitian Novianti & Sari (2023). Menjelaskan bahwa tingkat efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lumbang Dusun Penyengat berdasarkan tiga indikator yaitu indikator input, proses, dan output hasil penelitian membuktikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Penyengat yang berjumlah 68 orang dengan sampel responden 27 orang termasuk kategori sangat efektif. Hal ini ditunjukkan oleh indikator input sebesar 80%, indikator proses 100%, dan indikator output sebesar 100%. Studi Saragi et al., (2021). Mengurai tentang peserta PKH Desa Kota Rantang sebenarnya tidak layak karena telah membangun rumah yang layak. Akan tetapi berdasarkan jumlah penghasilan keluarga, peserta PKH layak mendapatkan bantuan PKH khususnya selama pandemi banyak masyarakat terdampak kehilangan pekerjaan. Namun demikian, telah banyak terjadi perubahan yaitu pengurangan jumlah KK yang mendapatkan bantuan PKH di Desa Kota Rantang karena dianggap tidak lagi masuk.

Selanjutnya riset Luthfi, (2019) Membahas bahwa secara umum efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Apabila dilihat dari

keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak Keluarga Miskin, membantu biaya kesehatan & gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari Keluarga Miskin, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan Posyandu, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi [Muin & Rosdiana \(2020\)](#) menguraikan tentang pada indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata sebagai berikut dimana belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya penerima bantuan yang mempergunakan dana yang diterimanya di luar ketentuan yang dipersyaratkan misalnya dana yang diterimanya dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan keperluan dapur lainnya karena alasan tertentu.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, perbedaannya terletak pada temuan penelitian yang lebih spesifik menganalisis efektivitas PKH bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih. Topik ini masih jarang dikaji dalam konteks Sosiologi, khususnya dengan menggunakan teori Struktural Fungsional dari Robert K. Merton. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih. Selain itu, isu yang diangkat dalam penelitian ini menjadi topik penting untuk dikaji, mengingat temuan yang dihasilkan berpotensi memberikan kontribusi berharga bagi pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat penerima PKH di Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Melalui pendekatan ini peneliti menggali informasi atau data sebanyak mungkin untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga (PKH) bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dimulai dari tanggal 19 September sampai 19 Oktober 2024 di Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, menurut ([Abdulssamad, 2018](#)). Subjek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan tentu yang diambil berdasarkan tujuan penelitian dengan jumlah informan 11 orang seperti dalam tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Tabel 1. Informan Penelitian**

No	Nama	Usia	Jabatan
1	Syahrial S.H	56 tahun	Lurah Sungai Sapih
2	Mayang Torina Lubis S.Pd	40 tahun	Pendamping PKH
3	Nova Lina	45 tahun	Ketua Kelompok PKH
4	Martitah	48 tahun	Penerima PKH
5	Sarmiati	52 tahun	Penerima PKH
6	Irma Wati	45 tahun	Penerima PKH
7	Fatima Wati	42 tahun	Penerima PKH
8	Marni Enur	46 tahun	Penerima PKH
9	Cas Nawati	42 tahun	Penerima PKH
10	Nurlis	51 tahun	Penerima PKH
11	Isnal Wati	46 tahun	Penerima PKH

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara kepada Masyarakat tahun 2024

Adapun kriteria subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Lurah Sungai Sapih, pendamping PKH, ketua kelompok PKH, penerima PKH. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah non partisipan, dimana peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam observasi yang diamati. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam, dimana peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Studi dokumen dapat berupa surat, catatan harian, foto, jurnal kegiatan dan sebagainya ([Sujarweni, 2014](#)). Dalam menganalisis data yang telah ada penelitian ini menggunakan analisis oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data yang telah ada penelitian dan penarikan kesimpulan ([Sugiyono, 2017](#)). Penelitian ini melihat keabsahan data menggunakan tiga triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu Teori Fungsionalisme struktural Robert K. Merton.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program keluarga harapan (PKH) terhadap masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang diukur menggunakan lima

indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, adalah sebagai berikut:

### **Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih**

#### **Pemahaman Program**

Pemahaman program adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Menyampaikan pemahaman ini kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dan pertemuan yang dilakukan oleh pendamping PKH dengan penerima bantuan dilaksanakan secara rutin sekali sebulan, dengan membentuk beberapa kelompok berdasarkan wilayah. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 10 hingga 30 orang, dan salah satu anggota dari setiap kelompok akan ditunjuk sebagai ketua untuk memudahkan pendamping dalam melakukan koordinasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Mayang Torina Lubis (40 tahun) selaku pendamping PKH di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang menyampaikan bahwa:

*"...Sabagai pandampiang PKH, tanggung jawab kami, terkhusus ibuk, punyo kewajiban maagiah pamahaman tentang PKH di kelurahan Sungai Sapih, sakaligus mandanga kaluah kesah ataupun parmasalahan yang dihadapi dek panarimo bantuan PKH. Dengan adonyo patamuan atau kegiatan sosialisasi ko, diharok masyarakat labiah tabukak dengan masalah-masalah yang dialami salamo manjadi panarimo bantuan PKH..."* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

"...Sebagai pendamping PKH, tanggung jawab kami, khususnya saya dek, berkewajiban memberikan pemahaman tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Sapih, sekaligus mendengarkan keluh keluhan ataupun permasalahan yang dialami oleh penerima bantuan PKH. Dengan adanya pertemuan atau kegiatan sosialisasi ini, diharapkan agar masyarakat lebih terbuka dengan permasalahan-permasalahan yang dialami selama menjadi penerima bantuan PKH" (Wawancara langsung Tanggal 21 Agustus 2024).

Pernyataan Ibu Mayang Torina Lubis (40 tahun) menyatakan bahwa sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa setiap kewajiban mereka dalam program tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pemberian pemahaman secara langsung kepada para penerima manfaat, agar mereka dapat memanfaatkan bantuan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya Ibu Mayang torina Lubis (40 tahun) secara rutin mengadakan pertemuan sosialisasi setiap bulan yang menjadi wadah komunikasi antara pendamping dan penerima PKH.

Sosialisasi yaitu mengenai tujuan dari pelaksanaan PKH, seperti tambahan pernyataan dari pendamping PKH sebagai berikut:

*"...Ibuk acok maulang tujuan PKH supayo ibuk ibuk panarimo PKH taruih ingek kalau bantuak ko ndak sekedar uang tunai, tapi untuak mandukung pendidikan anak dan kesehatan. dana yang diagiah sebaiknya digunoan untuak kebutuhan sakolah, bantuak mambali buku, saragam, atau kaparaluan baraja, kamudian, mamastikan anak anak dapek layanan kesehatan yg baik. ibuk juga maingekan mereka kalau informasi labiah lanjut mengenai tujuan PKH dapek dengan mudah dicaliak di internet. sado katantuan dan manfaatnyo alah dijalehan sacaro lengkap di sinan. yang pantiang bantuan ko harus dimanfaatkan dengan bijak supayo batua batua bamanfaat bagi keluarga panarimo..."* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

"...Saya sering mengulang tujuan PKH agar ibu-ibu penerima PKH selalu mengingat bahwa bantuan ini bukan sekedar uang tunai, tetapi untuk mendukung pendidikan anak dan kesehatan. Dana yang diberikan sebaiknya digunakan untuk kebutuhan sekolah, seperti membeli buku, seragam, atau perlengkapan belajar, serta memastikan anak-anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Saya juga mengingatkan mereka bahwa informasi lebih lanjut tentang tujuan PKH dapat dengan mudah ditemukan di internet. Semua ketentuan dan manfaatnya sudah dijelaskan secara lengkap disana. Yang terpenting bantuan ini harus dimanfaatkan dengan bijak agar benar-benar bermanfaat bagi keluarga penerima..." (Wawancara tanggal 21 agustus 2024)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman program, upaya sosialisasi terkait PKH telah berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat memahami hakikat PKH, hak dan tujuan penerima manfaat. Memfasilitasi pertemuan kelompok rutin setiap bulan terbukti bermafaat dalam membangun komunikasi dan mempererat hubungan antara masyarakat dengan pendamping PKH. Dengan demikian, indikator pemahaman program ini telah efektif untuk PKH.

### **Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran memegang penting dalam pelaksanaan program, karena hal ini menjadi indikator keberhasilan program yang dijalankan, memungkinkan kita untuk menilai apakah program tersebut berhasil atau tidak. Dalam hal ini, manfaatnya hanya diberikan kepada keluarga yang datanya awal berasal dari desa, dengan sasaran adalah masyarakat miskin yang telah memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH. Sesuai dengan pernyataan Ibu Nova lina (45 tahun) selaku penerima PKH di Kelurahan Sungai Sapih mengatakan bahwa:

*“...Kalau masalah ketepatan sasaran, menurut ibuk, karano bantuan PKH ko cuma diagiahkan ka keluarga yang sangai miskin, dan datanyo didapek dari satiok desa. Kami juo menyeleksi untuak manantuan sia yang berhak manarimo dan sia yang indak, karano ado babarapo panarimo PKH yang rumahnyo mungkin nampak gadang, tapi penghasilannyo randah, sahingga mereka juo layak mandapekan bantuan...”* (Wawancara dalam bahasa minangkabau)

Artinya:

“...Kalau soal ketepatan sasaran, menurut saya, karena bantuan PKH ini hanya diberikan kepada keluarga yang sangat miskin, dan datanya diperoleh dari setiap desa. Kami juga melakukan seleksi untuk menentukan siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak, karena ada beberapa penerima PKH yang rumahnya mungkin terlihat besar, tetapi pendapatannya rendah, sehingga mereka juga layak mendapatkan bantuan...” (Wawancara langsung Tanggal 21 Agustus 2024)

Penjelasan Ibu Nova lina (45 tahun) selaku penerima PKH mengungkapkan bahwa untuk ketepatan sasaran penerima PKH ini sudah terbilang tepat dikarenakan bantuan PKH ini hanya diberikan kepada keluarga yang sangat miskin, dan datanya diperoleh dari setiap desa. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penerima bantuan PKH yaitu ibu rumah tangga (IRT) dan memiliki pekerjaan yang tidak menentu. Mengenai ketepatan sasaran dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sapih sudah berjalan dengan baik sehingga indikator tepat sasaran dapat dikatakan efektif.

### **Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan PKH sangat penting, mengingat bantuan sosial tersebut diberikan setiap tiga bulan sekali kepada setiap penerima PKH. Adapun masalah waktu penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sungai Sapih yang disampaikan oleh pendamping PKH Ibu Sarmiati (52 tahun).

*“...Kalau soal tanggal pencairan dana PKH, itu ndak bisa dipastikan sacaro pasti, tapi, yang jaleh dana PKH dicairkan sabanyak ampek kali dalam satahun. pencairan biasonyo dilakukan dalam ampek tahap, sesuai jo jadwal yang alah ditantuan oleh pemerintah. waktu pencairan biasonyo beda beda tagantuang kabijakam dan proses administrasi di daerah masing masing. maka dari itu, panarimo manfaat disarankan untuak selalu mangikuti informasi resmi dari pendamping PKH atau pihak terkait supaya ndak katinggalan jadwal pencairan...”* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

“...Kalau soal tanggal pencairan dana PKH, itu tidak bisa dipastikan secara tepat. Namun, yang jelas dana PKH dicairkan sebanyak empat kali dalam setahun. Pencairan biasanya dilakukan dalam empat tahap, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Waktu pencairan biasanya berbeda-beda tergantung kebijakan dan proses administrasi di daerah masing-masing. Oleh karena itu, penerima manfaat disarankan untuk selalu mengikuti informasi resmi dari pendamping PKH atau pihak terkait agar tidak ketinggalan jadwal pencairan...” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2024).

Senada yang disampaikan oleh ibu Irma Wati (45 tahun) mengatakan bahwa:

*“...Kalau soal tanggal pencairan dana PKH, itu ndak bisa dipastikan sacaro pasti. Karano proses pencairannya bertahap, untuk itu etek selaku panarimo PKH tetap sabar manunggu pencairan PKH karano etek sangai bergantung pado dana PKH. Oleh karena iitu, penerima manfaat disarankan untuak selalu mangikuik informasi resmi dari pendamping PKH atau pihak terkait agar tidak ketinggalan jadwal pencairan. (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)*

Artinya:

“...Untuk tanggal pencairan dana PKH tidak bisa dipastikan secara cepat. Dikarenakan proses pencairannya bertahap, untuk itu ibu selaku penerima PKH tetap sabar menunggu pencairan PKH dikarenakan ibu sangat bergantung pada dana PKH tersebut. Oleh karena itu, penerima manfaat disarankan untuk selalu mengikuti informasi resmi dari pendamping PKH atau pihak terkait agar tidak ketinggalan jadwal pencairan...” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2024).

Hal ini juga ditegaskan oleh Ibu Mayang (40 tahun) dimana penerima dana PKH dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Waktu penerimaan dana yaitu bulan januari, April, Juli, dan Oktober.

*“...Di bulan Oktober dana PKH talaik pencairannyo, karano pencairan dana PKH acok tajadi karano adonyo kendala administratif atau proses verifikasi yang paralu waktu lamo. Dek itu, akibatnyo penyaluran dana yang saharusnyo ditarimo dalam waktu tatantu manjadi tatunda, sahingga badampak ka panarimo manfaat yang sangaik mambutuhkan data tu untuak kebutuhansahari-hari...” (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)*

Artinya:

“...Di bulan Oktober dana PKH telat pencairannya dikarenakan pencairan dana PKH sering terjadi karena adanya kendala administratif atau proses verifikasi yang memerlukan waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan penyaluran dana yang seharusnya diterima pada waktu tertentu menjadi tertunda, sehingga berdampak pada penerima manfaat yang sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari...” (Wawancara Tanggal 21 Agustus 2024).

Hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa ketepatan waktu pencairan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sapih telah berjalan dengan baik. Meskipun tanggal pencairannya tidak selalu tetap, namun setiap 3 bulan, proses penerimaan dana PKH tetap terlaksana dengan lancar, sehingga indikator ketepatan waktu dapat dianggap efektif.

### **Tercapainya Tujuan**

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu sasaran dan target yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan panduan tentang arah yang ingin dicapai. Program keluarga harapan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak-anak dan pelayanan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin (dalam jangka pendek), serta membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (dalam jangka pendek). Sesuai dengan yang disampaikan Ibu Fatima Wati (42 tahun) selaku penerima PKH di Kelurahan Sungai Sapih.

*“...Adonyo bantuan PKH ko diharapkan dapek mambantu masyarakat tarutamo dalam hal pendidikan jo kesehatan. bantuan ko bertujuan untuak maringankan beban keluarga panarimo manfaat supayo anak anak bisa sakolah tanpa kendala biaya. salain itu, PKH juo mandukung akses layanan kesehatan yg baik, seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan pemenuhan gizi anak. dengan pemanfaatan yang tapek, program lo dapek maningkatkan kesejahteraan keluarga serta maagiah masa depan yang labiah baik untuak anak anak...” (Wawancara dala bahasa Minangkabau)*

Artinya:

“...Adanya bantuan PKH ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan beban keluarga penerima manfaat agar anak-anak bisa bersekolah tanpa kendala biaya. Selain itu, PKH juga mendukung akses layanan kesehatan yang baik, seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan pemenuhan gizi anak. Dengan pemanfaatan yang tepat, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak...” (Wawancara Tanggal 21 Agustus 2024).

---

Mengenai pelaksanaan PKH di Kelurahan Sungai Sapih tentang berjalan dengan baik atau tidak dijelaskan oleh Syahril (56 tahun) PKH sebagai berikut:

*“...Bapak maraso program ko alah bajalan dengan baik. sabagai lurah apak taruih menegaskan dan manyampaikan ka panarimo manfaat tentang tujuan utamo dari PKH. bantuan ko ndak sekedat uang tunai, tapi untuak mandukung pendidikan anak dan kesehatan keluarga. ibu taruih maingekan supaya dana yang ditarimo dipakai sesuai kebutuhan, seperti mambayia biaya sekolah, mambali perlengkapan baraja, serta mamastikan anak anak mandapek layanan kesehatan yang diparlukan. dengan pemahaman yang baik, diharap PKH batua batua mambaok manfaat bagi keluarga panarimo...”*  
(Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

“...Bapak merasa program ini sudah berjalan dengan baik. Sebagai lurah, ibu selalu menegaskan dan menyampaikan kepada penerima manfaat tentang tujuan utama dari PKH. Bantuan ini bukan sekedar uang tunai, tetapi untuk mendukung pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Ibu juga terus mengingatkan agar dana yang diterima digunakan sesuai kebutuhan, seperti membayar biaya sekolah, membeli perlengkapan belajar, serta memastikan anak-anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan PKH benar-benar membawa manfaat bagi keluarga...” (Wawancara Tanggal 21 Agustus 2024).

Selanjutnya, terkait pernyataan mengenai adanya pengawasan dari pendamping terhadap penerima bantuan, hal tersebut memang telah dilakukan secara langsung oleh pendamping PKH, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Mayang (40 tahun) sebagai berikut.

*“...Iyo, ado. sabagai pendamping, ibuk selalu maingekan panarimo PKH supaya manggunoan bantuan ko untuk kaparaluan pendidikan dan kesehatan anak, serta ibu hamil. bantuan ko tujuannyo untuak mamanduahi kebutuhan gizi dan mencegah stunting anak anak. ibuk juo menegaskan bahwa PKH bukanlah gaji, malainkan bantuan dari pemerintah melalui kementerian sosial untuak maringankan beban keluarga yang membutuhkan. mako dari itu, dana yang diagiah harus digunoan dengan bijak sasuai jo tujuannyo...”*(Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

“... Ya, ada. Sebagai pendamping, saya selalu mengingatkan penerima PKH agar memanfaatkan bantuan ini untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak, serta ibu hamil. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mencegah stunting pada anak-anak. Saya juga menegaskan bahwa PKH bukanlah gaji, melainkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk meringankan beban keluarga yang membutuhkan. Oleh karena itu, dana yang diberikan harus digunakan dengan bijak sesuai dengan tujuan...”  
(Wawancara tanggal 21 Agustus 2024).

Selain untuk keperluan pendidikan dan kesehatan mereka juga menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan lainnya Seperti Kartu PKH dijadikan untuk jaminan hutang, membeli peralatan dapur, modal usaha, membeli baju, hal ini di ungkapkan oleh ibu Cas Nawati (42 tahun).

*“... Bantuan PKH iko turun tigo bulan sekali jo pengambilan bantuan do kantua pos, tapi, bantuan PKH iko kadang talambek pencairannya, biasanya talambek semingu atau duo minggu dari jadwal pencairannyo, tapi, iko ala 1 bulan 45 talambek pencairan bantuan PKH. Biasanya kalau bantuan lah turun, etek gunoan untuak mambayia pith komite. Rp. 150.000, - mambali buku tulih, buku LKS, sapatu anak, jo balanjo dapua. Karno ado keterlambatan pencairan pada tahap iko, etek jadinya utang di kadai untuak mambayia pith komite anak jo kebutuhan sekolah anak lainnyo, jadi katiko bantuan lah turun etek agiah kartu PKH tu ka kakadai untuak mambayia hutang satiok bulanyo...”* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

“... Bantuan PKH ini turun setiap tiga bulan sekali dan pengambilan bantuan di kantor pos. Tapi, bantuan PKH ini kadang terlambat pencairannya, biasanya terlambat 1 minggu atau dua minggu dari jadwal pencairan, tapi sudah 1 bulan terlambat pencairan bantuan PKH. Biasanya kalau bantuan sudah turun, ibu gunakan untuk membayar uang komite Rp. 150.000,- membeli

buku tulis, buku LKS, sepatu anak, dan belanja dapur. Karena ada keterlambatan pencairan pada tahap ini, ibu jadinya utang di kedai untuk membayar uang komite anak dan kebutuhan sekolah lainnya, jadi ketika bantuan sudah turun ibu berikan kartu PKH ke kedai untuk membayar utang setiap bulannya...” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2024).

Hal yang sama juga dilakukan Ibu Martitah (48 tahun) dalam memanfaatkan PKH. Berdasarkan wawancara penerima PKH:

*“...Jadi salamo etek mandapekan bantuan PKH iko digunoan untuak keperluan anak nan masih ketek, misalnyo mambali ubek paracetamol sirup, vitamin imboost sirup, mambali sambal bergizi satiok harinyo, kadang-kadang etek gunoan unntuak mambali baju, jilbab untuk anak etek. Anak etek nan etek kadang suko minta dibalian baju, patang etek balian jilbab, samo baju...”* (Wawancara langsung dalam bahasa minangkabau)

Artinya:

“...Jadi, selama ibu mendapatkan bantuan PKH ini digunakan untuk keperluan anak masih kecil, seperti membeli obat paracetamol sirup, vitamin imboost sirup, membeli makanan yang bergizi setiap harinya, kadang sesekali ibu gunakan membeli baju, dan jilbab untuk anak ibu. Anak ibu yang kecil kadang suka minta dibelikan baju, kemarin ibu belikan baju, dan jilbab...” (Wawancara 21 Agustus 2024).

Penuturan informan di atas kepada penulis menegaskan bahwa hasil tercapainya tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sapih belum dikatakan efektif, dikarenakan sebagian penerima PKH digunakan untuk membeli peralatan dapur, Kartu PKH dijadikan untuk jaminan hutang, modal usaha, membeli baju. Jadi indikator tercapainya tujuan belum efektif

### **Perubahan Nyata**

Perubahan nyata adalah perubahan yang dirasakan secara langsung oleh individu atau kelompok terkait pelaksanaan kegiatan atau program yang telah dilakukan. Dampak dari perubahan ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada proses pelaksanaan yang diadopsi oleh para pihak yang terlibat, sehingga memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini Sesuai dengan pernyataan Ibu Sarmiati (52 tahun).

*“...Iyoo, ado parubahan. kini bantuan ko manolong bana dalam mamanduahi kebutuhan anak anak, tarutamo untuak mambali perlengkapan sekolah. mereka bisa mandapekan buku, saragam, dan alat tulis yang dibutuhkan tanpa harus khawatir kakurangan. dengan adonyo bantuan ko, anak anak jadi labiah samangaik baraja karna kabutuhan sakolahnyo tapanuahi. urang tuo juo maraso lebih ringan bebannyo, sahingga bisa labiah fokus mandukuang pendidikan anak anaknya, iko batua bantuan mambaok manfaat bagi keluarga panarimo...”* ( Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

“...Iya, ada perubahan dek. Sekarang bantuan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, terutama untuk membeli perlengkapan sekolah. Mereka bisa mendapatkan buku, seragam, dan alat tulis yang dibutuhkan tanpa harus khawatir kekurangan. Dengan adanya bantuan ini, anak-anak jadi lebih semangat belajar karena kebutuhan sekolahnya terpenuhi. Orang tua juga merasa lebih ringan bebannya, sehingga lebih fokus mendukung pendidikan anak-anaknya. Ini benar-benar membawa manfaat bagi keluarga penerima...” (Wawancara 21 Agustus 2024).

Pernyataan Ibu Sarmiati (52 tahun) mengulas tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang sangat membantu dalam meringankan beban perekonomian keluarga, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diterima melalui program ini sangat bermanfaat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Melalui dana yang diterima, ia dapat membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, tas, serta alat tulis yang sebelumnya sulit untuk dipenuhi karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, tanpa bantuan dari PKH, kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan anak-anaknya mungkin akan terabaikan, sehingga program ini dirasakan sangat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari keluarganya.

Ibu Marni Enur (46 tahun) juga menambahkan terkait hal ini kepada penulis.

*“...Alhamdulillah nak, ibu bersyukur bana dengan adonyo PKH ko. apolai, penghasilan suami ndak terlalu gadang. dengan bantuan ko, ibu bisa mambiyai kebutuhan sakolah anak anak, seperti mambali*

*buku, seragam, dan peralatan baraja lainnya. PKH benar benar mambantu maringankan beban keluarga, sahingga anak anak bisa taruih sakolah tanpa kendala biaya. bantuan ko bamanfaat bana bagi ibu ndak keluarga...”* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

Alhamdulillah, nak ibu sangat bersyukur adanya PKH ini. Apalagi, penghasilan suami ibu tidak terlalu besar. Dengan bantuan ini, ibu bisa membiayai kebutuhan sekolah anak-anak, seperti membeli buku, seragam, dan perlengkapan belajar lainnya. PKH benar-benar membantu meringankan beban keluarga, sehingga anak-anak bisa terus bersekolah tanpa kendala biaya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi ibu dan keluarga. (Wawancara 21 Agustus 2024).

Serupa yang diungkapkan oleh Ibu Isnal wati (46 tahun) mengenai pemanfaatan PKH.

*“...Alhamdulillah, sajak ibu ikut PKH, banyak bana parubahan yang ibu rasoan. tarutamo dalam pendidikan anak anak. dulu ibu payah mambiyai kebutuhan sekolah mereka, bantuak mambali saragam dan buku. tapi kini, dengan adonyo bantuan PKH, baban tu taraso labiah ringan. bantuan ko mambantu bana dalam memenuhi kabutuhan pendidikan anak anak, sahingga mereka bisa sakolah dengan lebih nyaman dan semangat...”* (Wawancara dalam bahasa Minangkabau)

Artinya:

“...Alhamdulillah, sajak ibu ikut PKH, banyak sekali perubahan yang ibu rasakan. terutama dalam pendidikan anak anak. dulu ibu payah membiayai kebutuhan sekolah mereka, untuk membeli seragam dan buku. Tapi sekarang, dengan adanya bantuan PKH, beban terasa lebih ringan. Bantuan membantu sekali dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak anak, sehingga mereka bisa sekolah dengan lebih nyaman dan semangat...” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2024).

Uraian informan tersebut menjelaskan perubahan nyata yang terjadi memberikan dampak yang baik bagi penerima bantuan PKH di Kelurahan Sungai Sapih. Bantuan ini telah membantu mengurangi beban pengeluaran, terutama dalam hal biaya pendidikan dan kesehatan. Jika diukur berdasarkan lima indikator di atas, penulis berpendapat bahwa efektivitas program keluarga harapan (PKH) terhadap masyarakat di Kelurahan Sungai belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kemiskinan melalui fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun, di disisi lain, PKH sudah berhasil membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek (Konsumsi langsung).

## **Pembahasan**

Penelitian tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang. dibahas menggunakan teori struktur fungsional dari Robert K. Merton. Teori struktur fungsional mengembangkan konsep fungsi dan disfungsi, serta fungsi manifes dan fungsi laten (Mulyasri & Hasmira, 2021). Menurut Merton fungsi ialah “konsekuensi- konsekuensi yang tidak disadari dan yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian suatu sistem”. Sedangkan disfungsi adalah konsekuensi-konsekuensi yang tidak disadari sehingga menciptakan penyesuaian yang mengganggu suatu sistem (Ritzer, 2018). Untuk konsep fungsi manifes dapat diartikan sebagai yang dikehendaki atau fungsi-fungsi yang diantisipasi yang secara sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Sedangkan, fungsi laten adalah sebagai yang tidak dikehendaki atau suatu tipe konsekuensi yang tidak terantisipasi oleh sistem sosial (Febrianti & Utami, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih terdapat beberapa pemanfaatan di layanan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemanfaatan bantuan sosial PKH. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa penerima PKH telah memanfaatkan bantuan sosial PKH bidang pendidikan. Bantuan sosial PKH bidang pendidikan, dengan kriteria anak berusia 6-21 tahun atau setara SD-SMA atau wajib belajar 12 tahun (Kemensos, 2021). Pemanfaatan bantuan sosial PKH bidang pendidikan, dimanfaatkan untuk membeli peralatan sekolah, membayar uang komite, membeli kebutuhan dapur, dan membayar hutang. Sedangkan, pemanfaatan bantuan sosial PKH bidang kesehatan dengan kriteria ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini 0-6 tahun (Kemensos, 2021). Para penerima telah memanfaatkannya untuk membeli makanan bergizi, membeli obat dan vitamin, membeli mainan untuk anak, dan jarang memeriksa kesehatan.

---

Faktor yang mempengaruhi proses pemanfaatan PKH, ada faktor yang mendukung sehingga disadari dalam menciptakan penyesuaian dalam sistem tujuan PKH yang telah tercantum di Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, seperti ada proses seleksi calon penerima bantuan PKH agar tepat sasaran dan proses administrasi ketika penyaluran bantuan sosial ([Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2018](#)). Pada proses administrasi penyaluran bantuan PKH yang dilakukan di kantor pos, para penerima PKH akan diminta untuk membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP.

Akan tetapi, proses pemanfaatan PKH masih ada saja penerima yang tidak memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan PKH, dikarenakan adanya faktor penyebab, seperti kemiskinan yang diderita penerima PKH dikarenakan mayoritas penerima PKH bekerja sebagai petani atau berkebun, sehingga menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak terlebih dahulu dan karena manajemen keuangan keluarga penerima PKH yang belum bisa mengatur keuangan yang ada.

Hasil temuan peneliti sesuai dengan pernyataan Merton mengenai konsep fungsi merupakan konsekuensi yang disadari akan menciptakan penyesuaian terhadap suatu sistem ([Ritzer, 2018](#)). Seperti, dalam proses pemanfaatan bantuan sosial PKH menggunakan proses seleksi calon penerima PKH agar tepat dalam memanfaatkan bantuan hal tersebut akan menimbulkan penyesuaian terhadap sistem tujuan PKH yang telah dibuat, dan proses administrasi ketika penyaluran bantuan PKH dilakukan di kantor pos, akan menciptakan adaptasi atau penyesuaian bahwa program PKH tidak bisa diambil oleh sembarang orang agar bantuan PKH dapat dimanfaatkan oleh keluarga yang berhak menerima.

Menurut Merton konsep disfungsi adalah sebuah struktur atau lembaga-lembaga dapat berperan dalam memelihara bagian-bagian sistem sosial, tetapi bisa juga menimbulkan konsekuensi negatif untuknya ([Umanailo, 2019](#)). Seperti, dalam proses pemanfaatan bantuan sosial PKH yang memiliki tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima melalui bantuan yang diberikan, akan tetapi dalam realitasnya proses pemanfaatan bantuan sosial PKH tidak sesuai dengan tujuan PKH. Dikarenakan kemiskinan yang diderita penerima PKH dan kurang mengerti keluarga penerima dalam mengatur manajemen keuangan keluarga ketika bantuan sudah disalurkan ([Putri & Putra, 2022](#)).

Konsep fungsi manifest merupakan fungsi yang direncanakan atau dibuat untuk menyempurnakan suatu sistem ([Ritzer, 2018](#)). Dalam pemanfaatan bantuan sosial PKH memiliki fungsi dalam bidang pendidikan untuk menyamaratakan pendidikan dengan cara memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak dengan membeli peralatan sekolah dan membayar uang komite. Dalam bidang kesehatan memiliki fungsi untuk mensejahterakan kesehatan keluarga penerima melalui memanfaatkan bantuan memeriksakan kesehatan di layanan fasilitas kesehatan, dan memanfaatkan bantuan untuk membeli makanan bergizi, membeli obat dan vitamin. Konsep laten merupakan fungsi yang tidak direncanakan sehingga dapat meruntuhkan apa yang ingin dicapai pada fungsi manifest ([Ritzer, 2018](#)). Pada proses pemanfaatan bantuan PKH bidang pendidikan penerima memanfaatkannya untuk membeli kebutuhan dapur dan membayar hutang. Sedangkan, pemanfaatan bantuan PKH bidang kesehatan penerima memanfaatkannya untuk membeli mainan anak dan jarang memeriksa kesehatan di pelayanan kesehatan yang ada.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Sebelumnya adanya bantuan sosial ini, banyak keluarga dengan kondisi ekonomi lemah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka ([Pangestu & Fedryansyah, 2022](#)). Dari temuan penulis juga mengungkapkan hal ini disebabkan oleh banyaknya anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, dengan adanya PKH kondisi ekonomi masyarakat mulai mengalami perbaikan. Bantuan yang diberikan, terutama dalam pada aspek pendidikan dan kesehatan, kemudian meringankan beban keluarga penerima. [Luthfi \(2019\)](#) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama ketidakmampuan Masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berkaitan erat dengan rendahnya akses terhadap pendidikan anak serta kesehatan ibu hamil dan balita.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Saragi et al., \(2021\)](#) penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penentuan peserta PKH didasarkan pada data yang telah tersedia dalam Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (SDTKS). Namun, tetap dilakukan pengecekan kondisi peserta untuk diverifikasi kembali oleh Kementerian Sosial. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam mengumpulkan seluruh peserta secara bersamaan setiap bulan untuk keperluan pengecekan dan pembinaan. Selain itu, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lumbang, Dusun Penyengat berdasarkan tiga indikator yakni indikator input, proses, dan output, masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap 27 responden dari total 68 peserta program.

---

Selanjutnya kajian [Sasmito & Nawangsari \(2019\)](#) menjelaskan tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terjalin secara baik dengan pendamping PKH, dan peserta PKH. Dinas Sosial melibatkan pendamping PKH dalam rapat koordinasi, seminar, dan matriks, sebagai bekal untuk meningkatkan profesional dalam implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Selain itu, kajian [Luthfi, \(2019\)](#) juga menjelaskan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB ini sudah berjalan dengan cukup baik dalam setiap tahapan proses pelaksanaannya.

Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan memanfaatkan bantuan PKH untuk mendukung pendidikan dan kesehatan keluarga. Bantuan ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta memastikan kesejahteraan mereka. Dengan memanfaatkan dana bantuan dengan tepat, PKH dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi penerima manfaat ([Kemensos, 2021](#)). Namun, di Kelurahan Sungai Sapih, tidak semua penerima memanfaatkan dana PKH sesuai dengan tujuannya. Sebagian masyarakat masih menggunakannya untuk keperluan lain, seperti membeli pakaian, peralatan dapur, atau membayar hutang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman mengenai penggunaan dana bantuan masih perlu ditingkatkan agar program ini benar-benar efektif. Faktor ekonomi dan kebutuhan mendesak sering kali menjadi alasan utama terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan dan PKH. Banyak keluarga menghadapi tekanan finansial yang mendorong mereka untuk memprioritaskan kebutuhan lain di luar aspek pendidikan dan kesehatan. Padahal, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya dapat mengurangi manfaat jangka panjang dari program ini dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Situasi idealnya adalah ketika kebutuhan dasar dalam pendidikan dan kesehatan telah terpenuhi terlebih dahulu melalui bantuan dana PKH, misalnya untuk pembelian seragam sekolah, perlengkapan belajar, atau layanan kesehatan yang layak. Apabila masih terdapat sisa dana setelah kebutuhan utama tersebut terpenuhi, barulah dana tersebut dapat dialokasikan untuk keperluan lain seperti membeli pakaian tambahan, jilbab, modal usaha, atau bahkan membayar hutang rumah tangga.

Masyarakat penerima PKH di Kelurahan Sungai Sapih belum sepenuhnya efektif dalam mengalokasikan dana PKH untuk menunjang pendidikan dan kesehatan. Hal ini terlihat dari penggunaan dana yang lebih sering dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti membeli peralatan dapur, modal usaha, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal dari pelaksanaan PKH oleh Dinas Sosial. Fenomena ini sesuai dengan teori Robert K. Merton mengenai konsep fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak diharapkan terjadi dalam Masyarakat. Seharusnya dana PKH digunakan untuk mendukung pendidikan dan kesehatan, namun masyarakat tidak mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan PKH. Robert K. Merton mengalokasikannya sesuai dengan tujuannya. Merton menegaskan bahwa apa yang dianggap fungsional bagi suatu Masyarakat belum tentu berlaku untuk masyarakat lainnya ([Ritzer, 2018](#)). Dalam hal ini, meskipun pelaksanaan PKH dapat dikatakan fungsional bagi masyarakat, penggunaan dana tersebut belum sesuai dengan tujuan utama dari program PKH. Ketidaksesuaian ini terlihat dari tidak digunakannya dana tersebut untuk membayar biaya pendidikan anak. Merton juga mengungkapkan bahwa kesatuan fungsional dalam masyarakat dapat berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan ([Ritzer, 2018](#)).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih maka kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, efektivitasnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masih belum optimal, khususnya pada indikator 'tercapainya tujuan'. yang dialami masyarakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap mekanisme distribusi dan edukasi penggunaan bantuan PKH agar tujuan program dapat tercapai lebih optimal. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada wilayah dan indikator yang digunakan, sehingga diharapkan. Peneliti ini masih terbatas pada pembahasan mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Sapih. Penelitian ini dapat menjadi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji mengenai topik ini secara mendalam. Tulisan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan wawasan kepada masyarakat akan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat.

---

## Daftar Pustaka

- Abdulssamad, Z. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Indonesia 2022. <https://www.bps.go.id/id/>
- Febrianti, R. D. &, & Utami, D. (2014). Pemanfaatan Bantuan Pkh Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Di Desa Sidorejo Kabupaten Sidoarjo. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Kemensos. (2021). Laporan Kinerja Kemensos 2021. <https://kemensos.go.id/unduh/laporan/laporan-kinerja-kementerian-sosial-2021>
- Kemong, B. (2015). Sistem Mata Pencarian Hidup Nelayan Tradisional Sukubangsa Kamoro di Desa Tipuka Kecamatan Mapurujaya Kabupaten Mimika Propinsi Papua. *Holistik*, 7(14), 1–19.
- Luthfi, M. (2019a). Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Comm-Edu*, 2(1), 81–89.
- Luthfi, M. (2019b). Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2442>
- Muin, R., & Rosdiana, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(2), 130. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1844>
- Mulyasri, A., & Hasmira, M. H. (2021). Ketidakefektifan PKH dalam Menunjang Pendidikan Siswa Miskin di Jorong Aia Baba. *Jurnal Perspektif*, 4(3), 348-358
- Novianti, & Sari, N. I. (2023). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan untuk Mengentaskan Kemiskinan di Desa Lumbang Dusun Penyengat Kecamatan Sambas. *Sosiosaintika*, 1(2), 71–82. <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v1i2.138>
- Pangestu, S. D., & Fedryansyah, M. (2023). Efektivitas PKH Bidang Pendidikan dalam Partisipasi Pendidikan Anak KPM di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 137. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.39232>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan parida. (2022). Faktor Faktor Keluarga Mampu Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). *Skripsi*, 13(2), 578–582.
- Putri, A., & Putra, E. V. (2024). Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah. *Jurnal Perspektif*, 7(1), 131–140. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.880>
- Ritzer, G, & Stepnisky, J. (2018). *Teori Sosiologi Modern.delapan* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rizayani, S., Syaharuddin, S., Handy, M. R. N., Abbas, E. W., & Jumriani, J. (2022). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru. *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 74–82. <https://doi.org/10.20527/pakis.v2i1.5209>
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahriani, S. (2016). Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Universitas Negeri Makassar.
- Umanailo, M. C. B. (2019). Talcot Parson and Robert K Merton. *Researchgate.Net, October*, 1–5. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9pmt3>
- Usman, C. (2019). Efektivitas program keluarga harapan (pkh) dalam rangka penanggulangan kemiskinan (suatu studi di kecamatan kota utara kota gorontalo). *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(1), 12-20.
- Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (1996). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan). *Jurnal Administrasi Publik UB*, 2(1), 29–34.
- Wiratna, S. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta